BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah marak terjadi dan hampir setiap hari adanya kejahatan korupsi di Indonesia. Awal kita rezim Orde Baru Presiden Suharto (1965-1998), yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mengesankan yang cepat dan berkelanjutan (dengan Produk Nasional Bruto rata-rata 6.7 persen per tahun antara tahun 1965-1996), tapi juga terkenal karena sifat korupnya.¹ Suharto memanfaatkan sistem patronase untuk mendapatkan loyalitas bawahannya, anggota elit nasional dan kritikus terkemuka. Dalam hal pertukaran peluang bisnis atau posisi politik Suharto bisa mengandalkan dukungan mereka. Dengan Angkatan Bersenjata (termasuk aparat intelijen) dan pendapatan sumber daya nasional sangat besar (yang berasal dari produksi minyak bumi yang *booming* pada 1970-an) yang Suharto gunakan, Suharto meraih kedudukan puncak dalam sistem politik dan ekonomi nasional, menyerupai kekuatan patrimonial penguasa tradisional di masa pra-kolonial dulu.

Dalam membuat kebijakan ekonomi, Suharto mengandalkan saran dan dukungan dari sekelompok kecil orang kepercayaan di sekitarnya. Kelompok ini terdiri dari tiga kategori: para teknokrat yang sekolah di Amerika Serikat (*USA-trained technocrats*), nasionalis ekonomi (yang mendukung gagasan

¹ <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item235> diakses hari Selasa, 31 Januari 2017, pukul 17.20 WIB

peranan besar pemerintah dalam perekonomian) dan kroni kapitalis (yang terdiri dari anggota keluarga dan beberapa konglomerat etnis Cina kaya). Pada saat itu, semua kategori ini dituduh korup namun sebagian besar penekanan mengarah ke lingkaran kecil kroni kapitalis (terutama anak-anak Suharto) yang merupakan penerima manfaat utama dari skema privatisasi negara - maka mereka tidak disukai oleh pengusaha nasional dan masyarakat - dan sering menjalankan monopoli bisnis besar yang beroperasi dengan sedikit pengawasan atau pemantauan².

Salah satu karakteristik penting korupsi selama Orde Baru Suharto adalah korupsi tersebut agak terpusat dan dapat diprediksi. Investor dan pengusaha bisa memprediksi jumlah uang yang harus mereka sisihkan untuk biaya-biaya 'tambahan' dan mereka mengetahui mana orang-orang yang akan perlu mereka suap. Tapi juga ada taktik untuk memasukkan kroni Suharto dalam kegiatan bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh birokrasi yang amat ruwet. Pola yang sama ini ada di tingkat lokal di mana gubernur dan komandan militer setempat menikmati hak istimewa yang sama seperti di pusat namun selalu sadar bisa kena hukuman dari pusat jika mereka mendorongnya (sogokan) terlalu jauh. Dengan era baru Reformasi, yang dimulai setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, situasi ini berubah.

Situasi ini berubah dengan drastis waktu setelah lengsernya Suharto pada 1998 program desentralisasi (penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri

² Ibid.

berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia) daerah yang ambisius dimulai pada tahun 2001 yang meramalkan pemindahan otonomi administrasi dari Jakarta ke kabupaten (bukan ke provinsi). Program baru ini sejalan dengan tuntutan masyarakat tetapi memiliki efek samping negatif pada pola distribusi korupsi. Penyusunan tidak lagi 'dikoordinasikan' seperti yang telah terjadi di masa lalu tapi menjadi terpecah-pecah dan tidak jelas. Desentralisasi berarti bahwa pemerintah daerah mulai membuat peraturan daerah baru (sering tidak dirancang dengan ketat) yang memungkinkan para pejabat lainnya dari berbagai tingkat pemerintah dan lembaga lainnya untuk berbaur dan meminta tambahan keuangan³.

Menyadari kebutuhan mendesak untuk mengatasi korupsi (karena merugikan investasi dan umumnya mendorong adanya ketidakadilan terus-menerus dalam masyarakat), sebuah badan pemerintah baru didirikan pada tahun 2003. Lembaga pemerintah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK), ditugaskan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi dengan menyelidiki dan mengusut kasus-kasus korupsi serta memantau tata kelola negara (yang menerima kekuasaan yang luas).

Namun, opini-opini mengenai prestasi KPK masih diperdebatkan. Para pengkritik menekankan bahwa KPK lebih fokus untuk menangani tokoh profil yang lebih rendah (tokoh kecil dan tidak penting), meskipun selama beberapa tahun terakhir, terutama menjelang akhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada beberapa kasus tokoh profil tinggi seperti menteri, pejabat

³ Ibid.

kepolisian berpangkat tinggi, hakim dan bendahara partai dari Partai Demokrat-nya Yudhoyono yang telah dipenjarakan. Sebagian keberhasilan dan keberanian KPK ini telah memicu perlawanan - sebagian besar dari orang-orang yang pernah diusut atau diinterogasi - mengklaim bahwa KPK sendiri adalah lembaga yang korup. Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah skandal telah muncul di mana anggota KPK - konon - dijebak oleh petugas polisi senior dan ditangkap untuk melemahkan kewenangan KPK.

Kepala KPK Abraham Samad (2011-2015) terpaksa mundur dari jabatannya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen hukum pada awal tahun 2015. Polisi Indonesia menuduh Samad memalsukan dokumen (termasuk paspor) untuk seorang wanita bernama Feriyani Lim. Diduga, Samad memiliki hubungan di luar nikah dengan wanita ini. Sebuah foto yang menunjukkan pasangan ini di tempat tidur juga sempat bocor (apakah gambar ini otentik tidak diketahui). Sebelumnya, terjadinya beberapa bocoran foto yang menunjukkan Samad intim dengan Miss Indonesia 2014 Elvira Devinamira (keduanya menolak keaslian foto-foto skandal dan hubungan di luar nikah). Mungkin tidak kebetulan bahwa foto-foto ini bocor sekitar satu hari setelah Samad mengumumkan kasus korupsi yang melibatkan⁴.

Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Selama pemilu presiden 2004 dan 2014, Presiden Yudhoyono memprofilkan dirinya sebagai orang yang mengabdikan dan bertekad mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya mengenai

⁴ Ibid.

korupsi di kalangan pemerintah. Hal ini membuatnya sangat populer sekitar waktu pemilihan umum tahun 2009. Namun, merajalelanya korupsi politik dan beberapa kasus gratifikasi yang tercantum di pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pejabat tinggi dalam pemerintahan telah menyebabkan peringkat-nya merosot tajam setelah tahun 2010, maka sedikit orang yang sedih waktu masa jabatan Yudhoyono selesai pada akhir tahun 2014.

Pukulan lain terjadi pada wibawa Presiden Yudhoyono adalah perginya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Sri Mulyani, yang memiliki reputasi integritas tinggi (meskipun sedikit dinodai oleh skandal Bank Century)⁵, ditugasi untuk mereformasi kantor pajak dan bea cukai yang korup di Indonesia. Dia cukup sukses dan bisa mengandalkan dukungan dari banyak orang Indonesia. Tetapi kinerjanya juga menciptakan musuh. Pada Mei 2010 ia meninggalkan politik Indonesia untuk menjadi Direktur Pelaksana di Grup Bank Dunia. Meskipun demikian, spekulasi yang menyebar luas, adalah bahwa pengunduran dirinya disebabkan tekanan politik dari pengusaha yang memiliki koneksi politik yang tinggi. Secara khusus, Grup Bakrie sering disebutkan dalam media Indonesia dalam hubungan ini (waktu itu Aburizal Bakrie jadi ketua partai Golkar, anggota koalisi pemerintahan Yudhoyono). Kritikus menyatakan bahwa Yudhoyono seharusnya mendukung menteri keuangan ini. Selain itu, beberapa kasus korupsi - yang melibatkan anggota partai Yudhoyono dan beberapa menteri - terjadi menjelang akhirnya pemerintahannya dan ini sangat merusak reputasi

⁵ Ibid.

Partai Demokrat (PD) maupun citra Yudhoyono sendiri (yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai pemimpin yang lemah karena munculnya skandal korupsi dalam partainya dan kabinetnya). Dalam dua tahun terakhir kepresidenannya Yudhoyono, Menteri Pemuda & Olahraga (Andi Mallarangeng) dan Menteri Agama (Suryadharma Ali) mengundurkan diri setelah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Sementara itu, pada tahun 2013 Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dituduh menerima suapan senilai USD \$260.000.⁶ Ini berarti bahwa - setelah awal yang menjanjikan - munculnya banyak kasus korupsi profil tinggi menjelang akhir masa jabatannya yang kedua, Yudhoyono tidak akan dikenang sebagai seorang yang berhasil memberantas korupsi.

Sejak 2014 Joko Widodo memimpin bangsa Indonesia. Sama dengan presiden sebelumnya dan para calon presiden sebelumnya Widodo menyerukan pertempuran melawan korupsi di negara ini, mendesak kebutuhan untuk sebuah 'revolusi mental' yang mencakup perhentian untuk keserakahan dan korupsi di masyarakat. Ini adalah ambisi yang susah tapi Widodo telah melakukan beberapa upaya penting, misalnya dengan memindahkan banyak layanan pemerintah menjadi layanan online (menyiratkan birokrat 'lapar akan disuap' memiliki kesempatan lebih sedikit untuk mendapatkan uang tambahan).

Sejauh ini, Presiden Widodo dapat menikmati citra sebagai orang bersih dari korupsi (meskipun ia dikritik karena mendukung calon kepala polisi Budi

⁶ Ibid.

Gunawan yang pernah menjadi tersangka dalam kasus korupsi). Juga dalam kabinetnya belum terjadi skandal terkait korupsi. Namun, Widodo harus tetap berhati-hati untuk tidak mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya.

Meskipun sebagian besar gambarannya (diatas) negatif, ada beberapa tanda-tanda positif. Pertama-tama perlu disebutkan bahwa ada dorongan besar dari rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia dan media yang bebas memberikan banyak ruang untuk menyampaikan suara mereka pada skala nasional, sementara para lembaga media juga asyik berfokus pada skandal-skandal korupsi (meskipun beberapa institusi media - yang dimiliki oleh politisi atau pengusaha - memiliki agendanya sendiri untuk melakukan hal ini). Dorongan rakyat untuk memberantas korupsi berarti bahwa "bersikap anti-korupsi" sebenarnya bisa menjadi *vote-gainer* (pendulang suara) yang penting bagi politisi yang bercita-cita tinggi. Terlibat atau disebutkan dalam kasus korupsi benar-benar bisa merusak karir karena dukungan rakyat akan merosot drastis. Efek samping negatif (bagi perekonomian negara) dari pengawasan publik ini yaitu pejabat pemerintah saat ini sangat berhati-hati dan ragu-ragu untuk mengucurkan alokasi anggaran pemerintahan mereka, takut menjadi korban dalam skandal korupsi. Perilaku berhati-hati ini bisa disebut sebagai keberhasilan pengaruh KPK yang memantau aliran uang, tetapi juga menyebabkan belanja pemerintah yang lambat.

Transparency International, institusi non-partisan yang berbasis di Berlin (Jerman), menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi tahunan (berdasarkan polling) yang menilai "sejauh mana korupsi dianggap terjadi di kalangan pejabat

publik dan politisi" di semua negara seluruh dunia. Indeks Persepsi Korupsi Tahunan ini menggunakan skala dari satu sampai sepuluh. Semakin tinggi hasilnya, semakin sedikit (dianggap) korupsi yang terjadi. Dalam daftar terbaru mereka (2015) Indonesia menempati peringkat 88 (dari total 175 negara). Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada metode yang akurat 100 persen untuk mengukur korupsi karena sifat korupsi (sering tersembunyi untuk umum). Maka angka-angka di bawah ini hanya menunjukkan tingkat persepsi korupsi oleh para pemilih yang berpartisipasi dalam jajak pendapat dari negara tertentu. Namun karena masyarakat biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi di negerinya, angka-angka ini pasti mengindikasikan sesuatu hal yang menarik dan berarti⁷.

Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara inilah yang wajib diganti oleh terpidana kasus korupsi (koruptor). Arti kerugian keuangan negara itu sendiri telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Pemberantasan Tipikor") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ("UU 20/2001"):

"Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

⁷ Ibid.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Sanksi pidana denda dalam kasus Tindak Pidana Korupsi adalah sanksi pidana tambahan bagi para terdakwa Tindak Pidana Korupsi untuk mengganti uang Negara yang sudah di ambil oleh terdakwa.⁸

Denda itu salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada dua jenis denda, denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Prinsipnya sama, sama-sama penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terpidana. Setidaknya tiga hal tersebut perbedaannya.

Sebagai hukuman, denda seperti halnya jenis-jenis hukuman lainnya hanyalah alat pendera, alat untuk membuat 'sakit' pelanggar hukum. Jika rasa sakit yang ingin dicapai dari hukuman penjara atau kurungan adalah hilangnya kebebasan bergerak untuk sementara waktu (atau seumur hidup), untuk denda tentunya adalah hilangnya sebagian harta benda khususnya uang yang dimiliki oleh terdakwa. Tentu rasa sakit bukan lah satu-satunya tujuan penghukuman, tapi dalam konteks ini cukup ini yang saya ingin jelaskan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54bf044fdb1c0/hukuman-tambahan-bagi-koruptor-yang-tidak-membayar-uang-pengganti> diakses hari Sabtu, 14 Januari 2017, pukul 22.00 WIB

Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari

unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.⁹

Sebagai alat pendera, denda bertujuan untuk memperkaya Negara atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara atau korban. Denda juga bertujuan untuk membuat pailit pelaku. Penjatuhan denda terhadap seorang pelaku, Negara menjadi diperkaya dan atau pelaku menjadi pailit, namun ini hanya akses bukan tujuan. Mengapa negara diperkaya? Karena denda tentunya dibayarkan kepada negara dan menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak.¹⁰

⁹ <http://kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> diakses hari Selasa, 31 Januari 2017, pukul 17.20 WIB.

¹⁰ <https://krupukulit.com/2012/03/06/tentang-denda/> diakses hari Sabtu, 14 Januari 2017, pukul 22.00 WIB.

Keseimbangan dalam hukum pidana tertera di dalam konsideran huruf c yang menyatakan bahwa asas keseimbangan menyatakan dengan tegas bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara dua kepentingan, yakni :

1. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (HAM), dengan;
2. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Ketika HIR masih berlaku, aparat penegak hukum berorientasi pada kekuasaan semata yakni sebagai “alat kekuasaan” atau “*instrument of power*”. Penegak hukum mempunyai wewenang yang tidak terbatas dan sama sekali tidak mengindahkan harkat dan martabat manusia (HAM).

Penahanan yang tidak ada batasnya dan dapat melampaui masa hukuman yang sedianya dijatuhkan, penyiksaan untuk memaksakan pengakuan tersangka maupun saksi merupakan pemandangan yang sudah sangat biasa pada waktu itu.

Perlindungan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia sangat terabaikan syarat dengan tekanan-tekanan fisik maupun mental.

Setelah kehadiran KUHAP, maka harkat dan martabat tersangka sebagai manusia mulai memperoleh perhatian dan perlindungan, aparat penegak hukum tidak dapat sewenang-wenang melakukan penangkapan dan penahanan atas seseorang yang diduga melakukan perbuatan/tindak pidana.

Pasal 17 KUHAP memaksa penyidik jika akan melakukan penangkapan orang yang diduga telah melakukan perbuatan/tindak pidana, maka terlebih

dahulu harus ada “bukti permulaan yang cukup” bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

Penjelasan pasal tersebut menegaskan, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Penegasan ini merupakan peringatan bagi penyidik, sebelum mengeluarkan perintah atau melakukan penangkapan harus terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti yang benar-benar dapat mendukung kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh calon tersangka melalui penyelidikan.

Demikian dengan tersangka/terdakwa juga diberi hak dan sekaligus merupakan kewajiban penyidik setelah melakukan penangkapan, apabila pejabat penegak hukum melakukan penahanan kepada tersangka/terdakwa, sejak semula orang yang ditahan dan keluarganya :

1. wajib diberitahu alasan penahanan dan sangkaan atau dakwaan yang dipersalahkan kepadanya;
2. keluarga yang ditahan harus segera diberitahukan tentang penahanan serta tempat dimana ia ditahan;
3. tersangka/terdakwa maupun keluarganya diberitahu dengan pasti berapa lama ia ditahan di masing–masing tingkat pemeriksaan.

Dengan berlakunya KUHAP sudah seharusnya system penyelidikan dan penyidikan menggunakan metode ilmiah atau “*scientific crime detection*” yang juga dapat diartikan sebagai “teknik dan taktis penyidikan kejahatan”.

Meskipun KUHAP telah melindungi harkat dan martabat manusia (HAM), tetapi di dalam prakteknya masih saja banyak terdapat penyidik yang masih menggunakan metode sebelum diberlakukan KUHAP yaitu metode memaksa pengakuan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaannya (BAP).

Faktor-faktor yang masih mendorong adanya penganiayaan, pemerasan pada tersangka dengan mengabaikan per-lindungan pada harkat dan martabat tersangka sebagai manusia (HAM), karena masih dipakainya pengakuan tersangka sebagai salah satu alat bukti.¹¹

Baik pidana kurungan maupun pidana penjara adalah merupakan pidana pokok dalam hukum pidana. Mengenai perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan, pada dasarnya merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan kemerdekaan seba¹²aimana dipaparkan oleh S.R Sianturi dalam bukunya berjudul "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", berikut kutipannya:

"Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara."

"Ketentuan tersebut ialah :

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).

¹¹ <http://asasasdaslamkuhap.blogspot.co.id/> diakses hari Kamis, 02 Februari 2017, pukul 14.27 WIB

¹² S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, 2002, hlm. 471

2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).
3. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, maksimum sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a (Pasal 18 KUHP).
4. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).

Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (Biasanya tidak di luar daerah Kabupaten yang bersangkutan) (Pasal 21 KUHP)”¹³

Sanksi Pidana Kurungan pengganti merupakan “Sanksi Tambahan” dalam Hukum Pidana, yang dijatuhkan oleh pengadilan, dengan suatu sifat tidak diwajibkan, dalam arti terdapat alternatif bagi terpidana untuk memilih, apakah akan membayar sejumlah denda atau akan di ganti dengan Hukuman Kurungan bila denda tersebut tidak dibayarkan. Lamanya Kurungan pengganti ditentukan oleh Majelis Hakim dalam rumusan amar putusannya.

Meski demikian, terdapat kontradiktif dalam stelsel Pemidanaan “denda dengan hukuman pengganti” ini. Disuatu sisi, tujuan denda dengan pidana pengganti ini bertujuan untuk membuat efek jera, namun untuk kasus seperti korupsi maupun penggelapan, sering terjadi bahwa terpidana membayar

¹³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pengertian-pidana-kurungan.-pidana-penjara.-dan-pidana-seumur-hidup> diakses hari Sabtu, 14 Januari 2017, pukul 23.17 WIB.

pidana denda dengan dana yang justru didapatkan olehnya bersumber dari hasil korupsi ataupun penggelapan, bukan dari kekayaan pribadi sang pelaku.¹⁴

Dari penjelasan diatas, Sanksi Pidana Denda harus dibayar dari harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana khususnya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan tidak boleh di bayar selain dari harta kekayaan terpidana. Sanksi pidana denda yang bisa di ganti dengan pidana kurungan atau subsider tidaklah seimbang karena biasanya Sanksi Pidana Kurungan maksimal dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan Sanksi Pidana Denda bagi terpidana korupsi bisa sampai hingga 1 milyar rupiah. Pada kenyataannya banyak terpidana korupsi yang memilih Sanksi Pidana Kurungan, karena terpidana lebih memilih membayar dengan hukuman badan ketimbang dengan membayar Sanksi Pidana Denda.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana keseimbangan sanksi denda terhadap terpidana korupsi dengan sanksi kurungan sebagai sanksi pengganti ?
2. Bagaimana sanksi pengganti yang tepat bagi sanksi denda yang tidak di bayarkan, sehingga tercapainya tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

¹⁴<http://www.hukum-hukum.com/2016/12/pidana-denda-kurungan-pengganti.html> diakses hari Sabtu, 14 Januari 2017, pukul 23.30 WIB.

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai keseimbangan dari sanksi pidana kurungan sebagai pengganti sanksi pidana denda dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dilihat dari tujuan pemidanaan.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai dari efek jera dari sanksi kurungan sebagai pengganti sanksi pidana denda dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai penerapan sanksi pengganti lain yang lebih membuat efek jera bagi para terpidana atau yang mempunyai niatan melakukan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan seumbangan pemikiran kepada Ilmu Hukum Pidana, terutama mengenai sanksi kurungan sebagai pengganti sanksi pidana denda. Selain itu, dapat dijadikan pedoman atau literature baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Mahasiswa

Melalui skripsi ini diharapkan mahasiswa lainnya dapat mengetahui mengenai sanksi kurungan sebagai pengganti sanksi pidana denda dalam

kasus Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur dan bagaimana tujuan pemidanaan memandangnya.

b. Masyarakat

Melalui skripsi ini masyarakat dapat mengetahui adanya ketidakseimbangan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti dari sanksi pidana denda bagi terpidana Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana atau yang bisa juga di sebut dengan peristiwa pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Sifat melawan hukum materiel dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.” (garis bawah dari penulis).

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan:

*“Yang bermaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.**” (garis bawah dan huruf tebal dari penulis).¹⁵*

Maka Tindak Pidana Korupsi adalah suatu cara yang mempunyai sifat melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dengan mengambil keuntungan dari uang kas Negara. Kejahatan Tindak Pidana Korupsi biasanya dilakukan oleh para Pejabat Negara, wakil rakyat, para wakil Kabupaten, wakil Provinsi dan wakil Negara tersebut. Para terpidana kejahatan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah memiliki upah atau gaji yang besar dari Negara, tetapi para terpidana Tindak Pidana Korupsi belum memiliki rasa puas atas kepuasan yang ada di dalam hati nuraninya.

Keberadaan terpidana Tindak Pidana Korupsi “The White Collar Crime” telah menjadi masalah besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara pada abad ke-20 dan 21 ini, baik di negara-negara maju maupun negara-

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 33.

negara berkembang seperti Indonesia. Kejahatan ini berkembang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk menanggung keuntungan memanfaatkan keahliannya dengan jalan melanggar hukum.

Teori kriminologi selalu mengaitkan faktor kemiskinan sebagai sebab-musabab timbulnya kejahatan. Anggapan kuno ini bagi "*the main in the street*" mungkin cocok karena adanya asumsi klasik dalam pandangan masyarakat bahwa kejahatan, *inkonkrito* menjadi kalangan "*lower class*" (kelas bawah, bagi masyarakat miskin). Kejahatan hanya dilakukan oleh orang-orang miskin atau orang-orang yang pernah gagal di dalam perjuangan untuk meningkatkan penghasilannya secara halal, karena mereka tidak berpendidikan.

Asumsi sempit demikian dalam perkembangan ilmu hukum tidak bisa dibenarkan. Zaman berkembang musim pun turut larut berubah cepat. Modus operandi kejahatan dan penjahat pun turut larut, selaras dengan perkembangan dan cara berpikir warga masyarakat yang semakin maju. Teori kriminologi mulai mempersoalkan bahwa bukan kemiskinan sebagai faktor utama sebab-musabab kejahatan melainkan justru kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong dan perangsang orang-orang dalam melakukan kejahatan. Iklan yang merangsang secara lihai dihubungkan dengan status sosial seseorang, demi prestise, demi dapat memenuhi tuntutan modernisasi, dan tidak kalah penting dorongan halus "ratu rumah tangga" karena terpengaruh dari "*demonstrasi effect*" oleh tetangga, kawan-kawan arisan atau saat hadir

pada suatu resepsi. Kemakmuran materiil merupakan faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan (terselubung).¹⁶

Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Apabila pengertian “pidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:

1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ oprasionalisasi/ konkretisasi pidana;
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana;
2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/ substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;

¹⁶ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 66-67.

- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP.¹⁷

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUHP (WvS), Konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal (bersumber pada Undang-Undang). Namun konsep juga memberi tempat kepada “hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis” sebagai sumber hukum (asas legalitas materiel).

Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiel itu, Konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materiel dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Penegasan ini diformulasikan dalam Pasal 11 Konsep 2004-2008 yang lengkapnya berbunyi:

1. “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan,

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *opcit*, hlm. 1-4

harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

Adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum materiel di atas, patut dicatat sebagai suatu *perkembangan baru* karena ketentuan umum seperti itu tidak ada dalam KUHP (WvS).¹⁸

Istilah “ketentuan pidana” merupakan istilah umum untuk menyebut keseluruhan atau norma hukum pidana. Keseluruhan aturan hukum pidana inipun sering disebut dengan sistem hukum pidana materiel atau substantif (*materielle strafrecht*), hukum pidana formal (hukum acara pidana/ *Straftverfahrecht/ Strafprozessrecht*), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*). Ketiga jenis aturan hukum pidana ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana untuk dapat hukum pidana (pidana) diwujudkan secara konkret. Oleh karena itu, ketiga aturan/hukum pidana itu dapat juga disebut sebagai sistem pidana/sistem hukum pidana dalam arti luas atau dalam arti fungsional. Sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana ini bisa disebut juga sebagai Sistem Penegakan Hukum Pidana.

L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana” (*the statutory rules relating to penal*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, CV.Elangtuo Kinasih, 2015, hlm. 41-42.

sanctions and punishment). Apabila pengertian “pidana” diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikaitkan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana fungsional dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan atau ketentuan hukum pidana materiil (substansif).¹⁹

Alasan pidana dapat di golongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain **Immanuel Kant** yang mengatakan “*Fiat justitia ruat caelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). **Kant** mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral atau etika. Menganjur lain adalah **Hegel** yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan PerUndang-Undang*, Pustaka Magister Semarang, 2015, hlm. 4-5.

merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.

2. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain **Paul Anselm van Feurbach** yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam *teori tujuan* ini berbeda sekli dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjukkan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

a. Untuk menakuti;

Teori dalam **Anselm von Reuerbach**, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa atau cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi*/pencegahan khusus).

c. Untuk melindungi;

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*/pencegahan umum).

Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Di antara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindakan pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya.

Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah **Binding**. Dasar

pemikiran teori gabungan adalah bahwa ppidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya ppidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun masyarakat.²⁰

Pidana kurungan dan kurungan pengganti adalah juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan dari pada pidana penjara. Keringanan tersebut antara lain :

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara.
3. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a (Pasal 18).
4. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat perasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28).
5. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri.²¹

Sanksi pidana kurungan adalah sanksi perampasan kemerdekaan itu karena sanksi pidana kurungan adalah merampas kebebasan bermasyarakat bagi para

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, 2011, Bandung, hlm.141-143

²¹ Ibid. Hlm 149-150

terpidana kurungan. Sanksi pidana kurungan bisa menjadi pengganti sanksi pidana denda bagi terpidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar denda yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya atau menjadi sanksi pidana bagi terpidana yang telah melakukan tindak pidana ringan.

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.²²

Pidana denda yang ditentukan dalam Undang-Undang atau pidana denda yang di jatuhkan oleh hakim di pengadilan, selama ini, belum mendapat perhatian bagi para ahli hukum pidana. Jenis pidana ini memang tidak semenarik pidana hilang kemerdekaan, seperti pidana penjara atau pidana seumur hidup, yang di anggap mempunyai efek jera yang paling efektif, walaupun di balik itu banyak permasalahan dan pertanyaan yang timbul akibat sistem pemasyarakatan dalam penjara (lembaga pemasyarakatan). Orang belum menghitung dan penegak hukum belum banyak mempertimbangkan bagaimana efisiensi dan efektifnya pidana denda jika diterapkan secara adil dan layak kepada terdakwa.

Studi terhadap “pembaharuan pidana denda di Indonesia” berangkat dari pemikiran-pemikiran para penyusun konsep Rancangan Undang-Undang

²² R. Abdoel Djamali, *op.cit*, hlm. 189.

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang ingin memfungsikan dan mengefektifkan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana hilang kemerdekaan, juga pada pembentuk Undang-Undang di luar KUHP yang akhir-akhir ini banyak mencantumkan pidana denda, di samping pidana penjara. Pikiran-pikiran atau konsep yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan penentuan pidana denda perlu disambut dengan baik karena pidana denda yang ditentukan mempunyai makna kesejajaran atau kesetaraan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Selain itu, ide untuk mengefektifkan jenis pidana denda dimaksudkan untuk menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara.²³

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Maksimum pidana denda adalah Rp. 0,25 x 15. Maksimumnya tidak ditentukan secara umum melainkan ditentukan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku II dan III KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan atau penerapan pasal 52 dan 52 a KUHP.

²³ Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Paps Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm.13-14

Denda sebagai pidana dijatuhkan oleh Hakim peradilan pidana sedangkan denda sebagai sanksi administrasi tidak melalui putusan peradilan tetapi melalui keputusan pejabat administrasi Negara. Denda dalam peradilan perdata juga diputuskan oleh pengadilan tetapi bukan peradilan pidana.²⁴

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam pasal 30-33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. Dengan begitu dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayarannya, hal demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.²⁵

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara hukum dibedakan atas dua ciri-ciri dari Negara formal menurut AV Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri²⁶:

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak ada kewenang-wenangan
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang

Indonesia merupakan Negara modern yang salah satu corak cirinya adalah corak Negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, dalam arti melindungi

²⁴ Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm. 150.

²⁵ R. Abdoel Djamali, *op.cit*, hlm. 189-190.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304-305

kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 alinea IV yang kemudian di jabarkan dalam pasal 1 ayat (3).

Di dalam Pancasila sebagai landasan ideologi Negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang harus mendapatkan keadilan dan sama di mata hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal diatas menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warga Negara baik mengenai haknya maupun kewajiban.

Suatu Negara tidak dapat dikatakan sebagai Negara Hukum, apabila Negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya:

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum.”

Pasal 28 I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dalam pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan Hukum, dan hak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.²⁷

Definisi Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

Pasal 2:

“Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan perekonomian negara.”

Pasal 3:

“Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.”

Pasal 5,6 dan 11:

“Kelompok delik penyuapan.”

Pasal 7:

“Delik yang berkaitan dengan pemborongan”

Pasal 8,9 dan 10:

“Kelompok delik penggelapan dalam jabatan”

Pasal 12:

²⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 175.

“Delik pemerasan dalam jabatan”

Pasal 12B dan 12C:

“Delik gratifikasi”²⁸

F. Metode Penelitian

Dalam upaya pengumpulan serta bahan-bahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis telah mengambil data atau bahan dari berbagai sumber yang ada hubungannya dan berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti untuk memecahkan pokok permasalahan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode pendekatan tertentu sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada di perpustakaan.²⁹

Peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji yaitu keseimbangan sanksi pidana denda sebagai sanksi pengganti sanksi denda dalam kasus Tindak

²⁸ <https://www.kpk.go.id/id/faq> diakses hari Senin, 16 Januari 2017, pukul 15.00.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57

Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, untuk kemudian dianalisis.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda, sebagaimana negara-negara Eropa kontinental lainnya dan bekas jajahannya, Indonesia merupakan penganut *civil law system*. Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara penganut *common law* lainnya, bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan pengadilan atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di dalam memilih buku teks ini, sekali lagi perlu dikemukakan bahwa mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda sangat dianjurkan kalau buku teks yang digunakan adalah buku teks yang ditulis oleh penulis dari Eropa kontinental dan buku-buku teks yang ditulis oleh penulis Anglo-Amerika.³⁰

2. Metode pendekatan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2005, hlm. 181-183

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/Analithical Theory yaitu dengan menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahannya.³¹

Pendekatan yuridis pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik. Ukuran yang digunakan untuk melihat atau untuk menentukan apakah suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak.

Sistem normatif maksudnya ialah bahwa tinjauannya itu berangkat dan memfokuskan diri, pada ketentuan hukum positif tata hukum yang menguasai perkara atau isu hukum yang bersangkutan. Artinya berada dalam kerangka kemauan dan maksud dari tata hukum yang bersangkutan. Untuk melihat sistem normatif dan ilmu hukum harus dipahami terlebih dahulu ciri-ciri atau karakter ilmu hukum normatif tersebut seperti dikatakan oleh Meuwissen:

- a. Bersifat analistis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.

³¹ Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm. 210

- b. Bersifat terbuka atau *open system*, artinya karena ilmu hukum normatif mensistematisasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, maka hal itu merupakan pengembangan yang mengarah pada suatu sistem hukum yang logis dan konsisten.
- c. Bersifat hermeneutic, artinya berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan hukum itu.
- d. Bersifat normatif, artinya selain objeknya norma, ilmu hukum normatif juga memiliki dimensi pernormaan.
- e. Memiliki arti praktis, maksudnya apa yang dikemukakan ilmu hukum normatif berkaitan dengan penerapan praktis dari hukum.³²

3. Tahap penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

³² Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mandara Maju, Bandung, 2008, hlm. 88-91

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu penganalisaan bahan hukum primer, berupa buku-buku, makalah, dan artikel berita serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam kajian ini peneliti menggunakan buku-buku, artikel, makalah dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan keseimbangan sanksi kurungan sebagai pengganti sanksi pidana denda dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.³³

Peneliti melakukan penelitian langsung kepada objek yang menjadi permasalahan, kemudian peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan .

- a. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³⁴ Penelitian

³³ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Pers, Jakarta. 2006, hlm 11

³⁴ Ibid 11

kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahan sekunder yaitu berupa tulisan para sarjana dibidang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan tentang data hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.³⁵ Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan meminta data yang berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan adalah alat tulis berupa bolpoin, pensil, buku catatan, flashdisk dan handphone. Penelitian mempelajari bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku-buku serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dan juga

³⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rienka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

didapatkan dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis yang diterapkan sesuai dengan metode pendekatan, maka data yang diperoleh dianalisis secara yuridis-kualitatif. Secara yuridis karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum positif. Sedangkan secara kualitatif merupakan data dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan yang disusun dengan baik tanpa menggunakan rumus matematika atau data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain:

a. Studi Pustaka

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung;
2. Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, beralamat di Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung;

b. Penelitian Lapangan

1. Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Jalan LL. RE. Martadinata No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jl. L. L. R.E. Martadinata, Citarum,
Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115, Indonesia

3. Lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Jalan A.H. Nasution No.
133, Karang Pamulang, Mandalajati, Sukamiskin, Arcamanik, Kota
Bandung, Jawa Barat 40195

c. Media Cetak dan Elektronik

1. Media Cetak : koran, majalah, artikel

2. Elektronik : Internet, Televisi.

8. Rencana Jadwal Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan berbagai kegiatan yang diawali dengan pencarian judul dan setelah disetujui, peneliti mencari bahan penulisan dengan jadwal kegiatan penelitian yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	2017					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Persiapan Judul & Acc Judul						
2	Studi Kepustakaan						
3	Bimbingan UP, Koreksi, Revisi dan Acc untuk diseminarkan						
4	Seminar UP						
5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan data Bab I sampai Bab V, Bimbingan dan Acc						
7	Sidang Komprehensif						
8	Perbaikan, Perjilidan dan Pengesahan						

Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi.

G. Sistematika Penulisan dan Outline

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi mengenai Latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI, SANKSI PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Bab ini terdiri dari definisi atau pengertian, pengaturan dan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.

BAB III KESEIMBANGAN ANTARA SANKSI PIDANA DENDA DENGAN SANKSI PIDANA PENGGANTI KURUNGAN

Bab ini terdiri atas kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

BAB IV ANALISIS TERHADAP KESEIMBANGAN SANKSI PENGGANTI YANG TEPAT BAGI SANKSI DENDA YANG TIDAK DIBAYARKAN

Bab ini terdiri dari permasalahan keseimbangan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti sanksi pidana denda, dan solusi dalam menangani masalah sanksi pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana Tindak Pidana Korupsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan berdasarkan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian pengerjaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKAN

LAMPIRAN